

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Produktivitas suatu organisasi pendidikan dipengaruhi oleh faktor, satunya adalah komponen pembiayaan. pembiayaan merupakan komponen utama dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Dalam hubungan ini perlu diperhatikan bahwa pembiayaan, yang merupakan salah satu aspek manajemen tidak melaksanakan sendiri kegiatan-kegiatan yang bersifat operasional, melainkan mengatur tindakan pelaksanaan dengan membentuk sistem. Sistem adalah, "Suatu jaringan kerja atau network yang terdiri dari prosedur-prosedur yang berhubungan satu sama lain yang tergabung bersama-sama untuk membentuk suatu kegiatan atau untuk mencapai sasaran spesifik".

Pendidikan menjadi investasi yang memberi keuntungan sosial dan pribadi yang menjadikan bangsa bermartabat dan menjadikan individualnya manusia yang memiliki derajat. Berbicara tentang penyelenggaraan pendidikan, maka tidak luput dari yang namanya keuangan pendidikan. Pembiayaan Pendidikan merupakan potensi yang sangat menentukan kualitas sumber daya manusia dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam manajemen administrasi pendidikan . Karena biaya merupakan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan, sehingga pendidikan sekolah diperlukan pelaksanaan pembiayaan yang efektif dan efisien, agar menghasilkan lulusan yang bermutu.

Kegiatan pendidikan dapat berfungsi dengan memadai apabila memiliki sistem manajemen yang didukung dengan sumber daya manusia (SDM)¹, biaya, dan sarana prasarana. Sekolah sebagai satuan pendidikan juga harus memiliki tenaga (kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, tenaga administratif, laboran, pustakawan, dan teknisi sumber belajar), sarana (buku pelajaran, buku sumber, buku pelengkap, buku perpustakaan, alat peraga, alat praktik, bahan dan alat tulis kantor (ATK), perabot), dan prasarana (tanah, bangunan, laboratorium,

¹ Bafadal Ibrahim. *Manajemen Perlengkapan Sekolah: Teori dan Aplikasinya* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 25

perpustakaan, lapangan olahraga), serta biaya yang mencakup biaya investasi (biaya untuk keperluan pengadaan tanah, pengadaan bangunan, alat pendidikan, termasuk buku-buku dan biaya operasional baik untuk personil maupun nonpersonil). Biaya untuk personil antara lain untuk kesejahteraan dan pengembangan profesi, sedangkan untuk biaya nonpersonil berupa pengadaan bahan dan ATK, pemeliharaan, dan kegiatan pembelajaran.²

Organisasi pendidikan yang bagus, dalam hal ini madrasah harus melaksanakan pembiayaan yang bagus pula untuk mencapai sebuah madrasah yang efektif dan efisien. Dalam rangka menciptakan sebuah pendidikan yang berkualitas maka pengelolaan pendidikan yang memadai juga berperan penting dalam mewujudkan hal tersebut.

Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2023 Bab I, pasal 1 yang mengatur tentang Standar Pembiayaan Pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah, yang meliputi standarisasi komponen biaya pendidikan yaitu:

1. Biaya investasi: adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengadakan barang dan jasa yang umurnya lebih dari 1 (satu) tahun untuk penyelenggaraan pendidikan di dalam Satuan Pendidikan. Biaya Investasi terdiri dari komponen biaya investasi lahan, penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap.
2. Biaya Operasional: adalah biaya yang dibutuhkan secara rutin dan berulang paling lama 1 (tahun) atau memiliki nilai nominal yang tidak dapat dikapitalisasi untuk mendukung terlaksananya layanan pendidikan.³ Biaya Operasional terdiri dari biaya personalia (antara lain: gaji pokok pendidik dan tenaga kependidikan, serta tunjangan dan insentif) dan biaya non-personalia (biaya alat tulis kantor, bahan habis pakai, daya dan jasa serta pemeliharaan).

² Bafadal. *Manajemen Perlengkapan Sekolah, Teori, dan Aplikasinya*, 25.

³Nanang Fattah. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017),

Mengenai pembiayaan pendidikan, Fattah (2001)⁵ memaparkan bahwa kualitas pendidikan dipengaruhi oleh biaya. Biaya yang rendah akan berimplikasi terhadap kualitas pendidikan dan proses pembelajaran, sehingga pada gilirannya akan menurunkan kualitas outcomes yang dihasilkan. Dengan demikian perencanaan pendidikan harus memanfaatkan, mengawasi penggunaan dan melakukan analisis pembiayaan.

Pendidikan yang berkualitas merupakan suatu investasi yang mahal. Kesadaran masyarakat untuk menanggung biaya pendidikan pada hakekatnya akan memberikan suatu kekuatan pada masyarakat untuk bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan.

Ketidakmampuan suatu lembaga untuk menyediakan biaya, akan menghambat proses belajar mengajar. Hambatan pada proses belajar mengajar dengan sendirinya menghilangkan kepercayaan masyarakat pada suatu lembaga. Namun, bukan berarti bahwa apabila tersedia biaya yang berlebihan akan menjamin bahwa pengelolaan akan lebih baik. Pada satuan pendidikan, pembiayaan pendidikan diperoleh dari iuran siswa, dan sumbangan masyarakat.

Pembiayaan Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara orang tua sebagai pihak pertama, pemerintah memberikan insentif berupa bantuan operasional Pendidikan. Permasalahan yang dihadapi penyelenggara pendidikan adalah darimana sumber-sumber biaya pendidikan didapatkan? Selama ini ketergantungan biaya Pendidikan bagi sebagian besar sekolah swasta terutama madrasah bersumber dari pemerintah. Partisipasi pembiayaan dari orang tua siswa mengambil porsi yang sedikit. Sementara partisipasi Masyarakat dalam bentuk donasi hanya terjadi pada madrasah atau sekolah swasta yang memiliki keterkaitan secara keorganisasian atau ideologi. Masalah berikutnya adalah lemahnya dalam pengelolaan. Minimnya pengetahuan tentang mengelola pembiayaan, penggunaan keuangan yang tidak tepat sasaran, tidak transparan atau tidak *akuntable*. Terutama untuk dana bantuan operasional dari pemerintah

⁴ Permendiknas Nomor 18 Tahun 2022

⁵ Fattah. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*, 94

(BOS). Laporan ICW (*Indonesian Corruption Watch*) sejak Januari 2016 hingga September 2021, tercatat 240 kasus korupsi Pendidikan dana BOS menyebabkan kerugian negara Rp 1,6 Trilyun.⁶ Aspek pengetahuan mengenai mengelola keuangan, kejujuran dan ketelitian serta taat aturan merupakan kunci keberhasilan mengoptimalkan penggunaan dana pendidikan. Masalah berikutnya yang menjadi perhatian dunia Pendidikan adalah pertanggungjawaban keuangan. Terutama pada sekolah swasta yang menarik dana dari orang tua dan menerima donasi dari masyarakat, pertanggungjawaban keuangan menjadi tolak ukur meningkatkan kepercayaan Masyarakat sehingga berdampak pada kemajuan lembaga tersebut. Indikator bahwa lembaga bertanggungjawab terhadap penggunaan dana adalah bertambahnya fasilitas sekolah baik kualitas maupun kuantitas. Meningkatnya kualitas pembelajaran sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan orang tua siswa sepadan dengan hasil yang didapat para siswa.

Dari berbagai hasil kajian konseptual dapat dideskripsikan bahwa manajemen pembiayaan pendidikan bersumber dari mencakup lima kegiatan pokok, yaitu: sumbangan pemerintah melalui BOS, sumbangan orang tua siswa, sumbangan masyarakat yang tidak mengikat, sumbangan alumni dan sumber lain (perusahaan lewat program CSR). Kebutuhan pembiayaan yang besar kecilnya didasarkan atas kebutuhan minimum setiap tahun dan perkiraan pendapatannya berpedoman pada penerimaan tahun lalu.

Dalam Undang-undang Sisdiknas Nomor 18 Tahun 2022 pasal 80-83 dijelaskan mengenai sumber dana pendidikan. Kategori pembiayaan pendidikan terdiri dari beberapa bagian, yaitu: sumber pembiayaan pendidikan dari APBN dan APBD, sekurang-kurangnya 20%. Bantuan tersebut berasal dari kerjasama sekolah dengan instansi lain atau yang sejenis. Diantaranya ialah bantuan yang berasal dari luar negeri.

Berdasarkan data Biro Pusat Statistik 2023, jumlah penduduk Indonesia mencapai 280,73 juta jiwa dan usia wajib belajar 12 tahun mencapai 44,19 juta jiwa⁷. Dengan jumlah tersebut maka terjadi pendidikan yang tidak merata.

⁶ Indonesia Corruption Watch. "Korupsi Dana Pendidikan <http://aclc.kpk.go.id> , (diakses 4 Juli 2024).

⁷ Statistik Indonesia 2023, *Badan Pusat Statistik Indonesia*, 14 Maret, 2024,

Dengan kemampuan yang terbatas, pemerintah tidak dapat melayani akses pendidikan bagi semua warganya. Pada keadaan ini maka peranan madrasah menjadi sangat penting. Madrasah berperan dalam menyelenggarakan pendidikan berdasarkan keimanan dan ketakwaan.

Salah satu lembaga pendidikan yang turut mengelola Pendidikan di Indonesia adalah madrasah. Madrasah menjadi mitra strategis dalam melaksanakan amanat Undang-undang pada pasal 31 ayat (1) setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Madrasah memiliki kesetaraan, sebagaimana tertuang pada Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 30 dan pasal 31. Jenjang Madrasah Ibtidaiyah (MI) setara dengan Sekolah Dasar (SD), jenjang Madrasah Tsanawiyah (MTs) setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Aliyah (MA) setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Perencanaan pembiayaan di madrasah sebagian besar masuk dalam penyusunan RKM yang disusun secara efektif dan efisien. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan Fattah bahwa dalam penyusunan anggaran adalah bagaimana memanfaatkan dana secara efisien, mengalokasikan secara tepat, sesuai dengan skala prioritas.⁸

Sebagai lembaga pendidikan yang telah lama berkembang di Indonesia, madrasah selain membina dan mengembangkan kehidupan beragama, juga berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa serta menanamkan rasa cinta tanah air dan semangat kebangsaan. Madrasah yang diberi otonomi untuk menyelenggarakan pendidikan, yang diwujudkan dalam pengelolaan berbasis madrasah. Yang bertujuan memberikan keleluasaan dan kemandirian madrasah dalam mengelola sumber daya demi meningkatkan mutu madrasah. Tujuan tersebut merujuk kepada tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:

Membina peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa

⁸ Sunedi dkk. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya*, and Zulfa Jamalie, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Bersumber dari Masyarakat: Studi Pada MTs Darul Ulum Palangka Raya*, Volume 9, No. 1,(2017), 40.

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.⁹

Madrasah dan lembaga pendidikan lainnya adalah sama, yaitu sebagai bagian tak terpisahkan dari Sistem Pendidikan Nasional. Sebagai lembaga pendidikan, baik sekolah maupun madrasah berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.¹⁰

Tujuan yang berkaitan dengan masalah metafisik, yaitu yang menyediakan wawasan, konsep, cara pandang supaya dapat “merubah dunia”, sehingga madrasah dirasakan memiliki manfaat secara nyata.¹¹

Dalam agama Islam, pendidikan memiliki kedudukan yang mulia, hal ini tercantum di dalam al-Qur'an maupun al-Hadits, juga dibuktikan dengan kedudukan dan peranan Nabi Muhammad Saw sebagai rasul sekaligus pendidik, dikuatkan dengan kebiasaan berfikir, menggali, menyimak dan mengungkap fenomena sekitar sejak awal Islam. Sehingga pendidikan di dalam Islam berfungsi pula sebagai pengemban tugas suci. Qur'an surat 58:11 menjelaskan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَأَفْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya : “Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Qs: 58:11)

⁹ Undang-undang No. 20 tentang Sisdiknas (Bandung: Citra Umbara, 2005), 3

¹⁰ Ara Hidayat dan Imam Machali. *Pengelolaan Pendidikan; Konsep, Prinsip Dan Aplikasi Dalam Mengelola Madrasah*. (Yogyakarta: Kaukaba, 2012) : 157.

¹¹ Postman, Neil and Ewingartner, Charles. *Teaching as A Subversive , Activity*. Penguin Education Book.London,1976): 45.

Ayat tersebut menjelaskan yang *pertama* berlapang-lapanglah dalam majelis. Majelis dalam konteks ini diartikan tempat duduk, dewan, sidang atau tempat melaksanakan pengajaran. Tersirat bahwa majelis tersebut berkaitan dengan ¹² kegiatan pendidikan. *Kedua*, betapa pentingnya ilmu dalam agama Islam sehingga Allah meninggikan beberapa derajat orang-orang yang ilmu. Orang berilmu lebih tinggi kedudukannya dimata Allah, terlebih di mata manusia. *Ketiga*, orang berilmu disejajarkan dengan orang yang beriman, artinya bahwa orang yang beriman haruslah berilmu dan orang yang berilmu harus beriman. Beriman dan berilmu harus seiring sejalan.

Namun hal ini dapat diwujudkan apabila didukung oleh anggaran yang sesuai, sehingga dapat menyangga kegiatan pembelajaran yang optimal dengan harapan dapat melahirkan lulusan yang bermutu.¹³

Untuk mencapai pendidikan yang bermutu, pemerintah mempunyai standar acuan yaitu a). Standar Isi, b). Standar Proses, c). Standar Penilaian, d). Standar Kompetensi Lulusan, e). Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, f). Standar Sarana dan Prasarana, h). Standar Pembiayaan.¹⁴ Standar pendidikan ditetapkan agar tercapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Mulyasa (Zahroh, 2014). Pengertian mutu mencakup input, proses, dan output pendidikan. Input pendidikan merupakan sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan demi berlangsungnya suatu proses. Sementara proses pendidikan merupakan perubahan sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Selanjutnya, output pendidikan merupakan kinerja sekolah, yaitu prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses dan perilaku sekolah. Maka mutu dalam dunia pendidikan dapat dinyatakan lebih mengutamakan pada keberhasilan siswa.

Perbedaan nominal pembiayaan pendidikan madrasah berpengaruh pada pemerataan dan kesetaraan dalam mencapai kualitas.¹⁵ Pendidikan madrasah mendapatkan porsi yang berbeda dengan pendidikan umum yang bernaung

¹² Amra Husma. *Islam Disiplin Ilmu* (Makasar: SiGn Press, 2017),11

¹³ Kisbiyanto. *Pengefektifan Manajemen Pendidikan*, Elementary, Vol 2, No 1 (2014) 144.

¹⁴ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2022.

¹⁵ Ferdi. WP. "Pembiayaan Pendidikan : Suatu Kajian Teoritis". *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol 4, No 3.(2019). 310-325

dibawah Kementerian Pendidikan Nasional, untuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pusat maupun daerah, bersumber dari bantuan hibah ataupun pos bantuan sosial. Perbedaan perlakuan tersebut mempengaruhi kualitas pendidikan di madrasah. Tata kelola keuangan madrasah dengan jujur, adil, cermat dan seksama menjadikan sebuah keharusan dalam mengatasi keterbatasan pembiayaan yang diperoleh madrasah. Seperti yang terdapat dalam surah 26: 181-184:

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ (181) وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ (182) وَلَا تَبْخَسُوا
النَّاسَ شَيْئًا هُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (183) وَأَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِيلَ الْأَوَّلِينَ (184)

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang merugikan; dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kalian merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kalian merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan; dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dan umat-umat yang dahulu”

.Ayat tersebut mengandung makna bahwa dalam segala hal berkaitan dengan urusan perhitungan maka harus dilakukan dengan adil, sesuai timbangan, tidak merugikan dan jujur. Dalam perspektif pengelolaan pembiayaan modern maka ayat tersebut menyiratkan pengelolaan pembiayaan secara jujur, akuntabel, efektif, efisien dan transparan sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan¹⁶.

Berkenaan dengan pengelolaan keuangan, para pengelola suatu lembaga pendidikan harus mampu menjalankan fungsi pengelolaan keuangan dengan baik.

Menurut Jones (Amka, 2021),¹⁴⁷ fungsi pengelolaan keuangan sendiri paling sedikit mencakup perencanaan pembiayaan (*budgetting*), pelaksanaan (*accounting*) pembiayaan, dan pemantauan (*auditing*). Pengelolaan keuangan yang buruk di sekolah berdampak pada berbagai aspek lainnya. Seringkali banyak lembaga pendidikan yang kurang memperhatikan fungsi manajemennya, misalnya pada tahap perencanaan, yaitu dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja sekolah (RAPBS) kurang memperhatikan peran serta masyarakat, dalam hal ini dalam hal ini komite sekolah. Dalam membuat RAPBS yang baik

¹⁶ Rusdiana, Wardija. *Manajemen Keuangan Sekolah: Konsep, Prinsip dan Aplikasinya di Sekolah/Madrasah* (Bandung, Arsad Press: 2022), 12-15

harus berpegang pada prinsip-prinsip umum yang berlaku mencakup antara lain tiga hal: 1) prinsip pembagian kekuasaan dan tanggung jawab, 2) prinsip keterlibatan pemangku kepentingan, dan 3) prinsip pembuatan program berdasarkan skala prioritas (Zahrudin et al., 2019)¹⁷.

Kemampuan manajerial di bidang pembiayaan menjadi sangat penting agar madrasah dapat berkembang menjadi sekolah unggul. Ada tahapan pengelolaan yang harus dipenuhi agar pembiayaan pendidikan bisa memberi nilai manfaat yang optimal yaitu; perencanaan, organisasi, koordinasi, motivasi, pengawasan dan penilaian.¹⁸ Lembaga pendidikan yang diteliti adalah Madrasah Tsanawiyah (MTs) Ishlahul Amanah Pangalengan dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al-Ishlah Linggar.

MTs Ishlahul Amanah Pangalengan berdiri dibawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Ishlahul Amanah yang didirikan pada tanggal 15 Juli 1998 oleh Dra. Hj. Lenny Oemar, M.Pd.I. terakreditasi A, jumlah murid 647 siswa terdiri dari 19 rombongan belajar dikelola oleh 39 pendidik dan 6 tenaga kependidikan . Kondisi keuangan MTs Ishlahul Amanah Pangalengan lebih baik dibanding rekannya. Dengan jumlah siswa 647 yang berpengaruh terhadap penerimaan BOS, disamping itu infaq bulanan dari orang tua siswa melalui komite madrasah sangat membantu meningkatkan upaya-upaya pengembangan madrasah. MTs Al-Ishlah berada di bawah naungan sebuah yayasan Pendidikan Islam Al-Ishlah Al-Basuniyah yang berdiri pada tanggal 23 Januari 1986 oleh H. Ondi Basuni. Terakreditasi B, dengan jumlah murid 203 orang terdiri dari 6 rombongan kelas dikelola oleh 27 pendidik dan 1 tenaga kependidikan¹⁹.

Dalam perkembangannya MTS Al-Ishlah Linggar dihadapkan pada masalah pembiayaan yang bersumber dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pusat dan infaq pendidikan dari siswa. Dengan jumlah murid 203 orang, bantuan pemerintah tidak dapat menutupi operasional kegiatan madrasah. Pengelola berusaha keras mengelola anggaran dengan ketat agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan dan

¹⁷ Zahrudin, Zainul Arif. "Implementasi Penyusunan RAPBS." *Jurnal Administrasi Pendidikan*: 26. no. 1 (2019): 46-56

¹⁸ Hidayat, Ara dan Rusdiana. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. (Bandung: Putera Setia, 2022), 101-102

¹⁹ Wahid Hasyim, Agus. (Kepala MTs Al-Ishlah Linggar) Linggar, Rabu, 11.00, 06 Maret 2024

Kebutuhan rutin yang menunjang operasional tetap berjalan.

Terdapat alasan mengapa MTs Ishlahul Amanah Pangalengan dan MTs Al-Ishlah Linggar menjadi lokus penelitian. Pertama, Kedua madrasah tersebut adalah madrasah swasta yang pembiayaan kegiatan belajar mengajar bergantung dari bantuan pemerintah melalui BOS. Kedua, kekurangan dana operasional pendidikan dibantu dana partisipasi orang tua siswa melalui infaq bulanan. Ketiga, berdasarkan wawancara awal dengan kedua kepala madrasah, diketahui bahwa keuangan madrasah walau berada di bawah struktur yayasan, tetapi kepala madrasah diberi kewenangan penuh mengelola anggaran asalkan disetujui oleh yayasan.

Hal ini berdampak kedua madrasah dapat menyediakan anggaran untuk peningkatan kualitas pembelajaran baik melalui kegiatan workshop, In House training, pembinaan rutin oleh pengawas madrasah maupun seminar-seminar online yang semuanya bertujuan meningkatkan kompetensi pedagogik dan kecakapan administrasi para pengajar pada madrasah tersebut. Hasil dari serapan anggaran pembiayaan dilaporkan secara transparan kepada stake holder melalui papan pengumuman dan laporan per semester yang diterbitkan untuk disebarkan kepada pihak berkepentingan.²⁰ Hasil ini berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat yang meningkat.

Hal ini jelas merupakan sebuah kemajuan bagi dunia madrasah terutama pada ke dua madrasah, yaitu MTs Ishlahul Amanah Pangalengan dan MTs Al-Ishlah Linggar, ditengah-tengah kondisi pendidikan madrasah yang dipandang sebelah mata. Dengan dasar itulah peneliti mengambil judul:

Pembiayaan Pendidikan Pada Madrasah Swasta di Kabupaten Bandung. (Penelitian di MTs Ishlahul Amanah Pangalengan dan MTs Al-Ishlah Linggar).

²⁰ Waka Kurikulum, *Dokumen Evaluasi Diri Sekolah*; (2019)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan konteks penelitian di atas, maka peneliti memfokuskan pembahasan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Perencanaan sumber Pembiayaan (*Budgetting*) Pendidikan di MTs Ishlahul Amanah Pangalengan dan MTs Al-Ishlah Linggar ?
2. Bagaimana Penganggaran pembiayaan pendidikan di MTs Ishlahul Amanah Pangalengan dan MTS Al-Ishlah Linggar?
3. Bagaimana pencatatan (*Accounting*) pembiayaan pendidikan di MTs Ishlahul Amanah Pangalengan dan MTs Al-Ishlah Linggar?
4. Bagaimana pertanggungjawaban (*Auditing*) Pembiayaan pendidikan di MTs Ishlahul Amanah Pangalengan MTs Al-Ishlah Linggar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Perencanaan pembiayaan (*Budgetting*) pembiayaan pendidikan di MTs Ishlahul Amanah Pangalengan dan MTs Al-Ishlah Linggar.
2. Untuk menganalisis penggunaan Anggaran pembiayaan pendidikan di MTs Ishlahul Amanah Pangalengan dan MTs Al-Ishlah Linggar.
3. Untuk menganalisis Pencatatan Anggaran pembiayaan pendidikan (*Accounting*) di MTs Ishlahul Amanah Pangalengan dan MTs Al-Ishlah Linggar.
4. Untuk menganalisis pertanggungjawaban (*Auditing*) pembiayaan pendidikan di MTs Ishlahul Amanah Pangalengan MTs Al-Ishlah Linggar.

D. Kegunaan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1 Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan, khasanah, dan ilmu pengetahuan tentang pembiayaan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam pengembangan penelitian berikutnya khususnya terkait dengan pembiayaan Pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

3. Bagi Madrasah

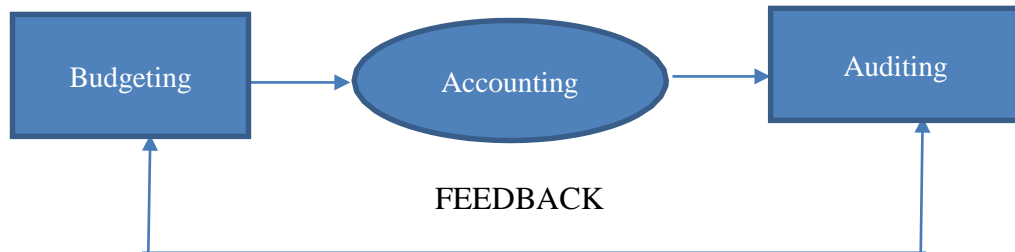
Diharapkan bisa menjadi bahan masukan dan bahan evaluasi pembiayaan pendidikan agar biaya Pendidikan yang diterima bisa seoptimal mungkin berguna dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, kerangka berpikir dapat digambarkan pada bagan di bawah ini, dimana pembiayaan pendidikan yang difokuskan pada peningkatan mutu pembelajaran tujuan akhirnya untuk mewujudkan sebuah layanan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat. Tentu ini merupakan *output* terpenting dalam sebuah proses pembiayaan Pendidikan yang diawali dari *support system* pendidikan yang mencakup keterlibatan pemerintah, masyarakat, orang tua, peserta didik (siswa), pengelola dan guru sebagai input. *Support system* ini yang mempengaruhi pembentukan manajemen pendidikan sekolah. Selanjutnya manajemen pendidikan secara langsung memberikan arahan dalam pelaksanaan proses pembiayaan Pendidikan. Pembiayaan pendidikan sendiri sekurangnya terdapat tiga tahapan penting yakni perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pembiayaan.

Kemudian dalam manajemen pembiayaan yang berorientasi untuk menghasilkan kualitas layanan pendidikan yang baik, salah satu upayanya adalah dengan memperhatikan mutu pendidikan. Program peningkatan mutu pembelajaran sepantasnya disusun sebaik mungkin yang ditunjang dengan pendanaan atau pembiayaan. Dengan demikian teori yang relevan dengan hal ini adalah teori manajemen yang berbasis sistem input-output yang digambarkan seperti di bawah ini:

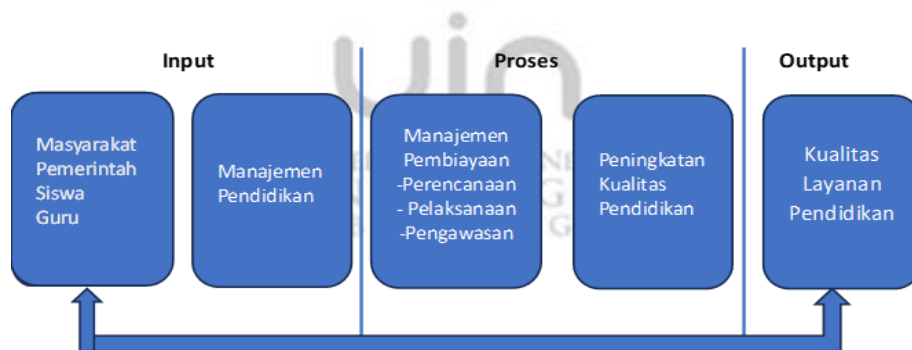
Gambar 1.
Siklus Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan



Sebagai suatu siklus pengelolaan pembiayaan, budgeting, accounting, dan auditing serta umpan balik dari auditing ke budgeting membentuk suatu rantai, dan kinerja satu bagian mempengaruhi yang lain. Tujuan mengelola pembiayaan pendidikan dapat mencerminkan harapan, kebutuhan, dan spesifikasi kelembagaan yang kuat.(Cheong Cheng & Ming Tam, 1997)²¹

Untuk lebih jelasnya kerangka berpikir dari penelitian ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 2.
Proses Kerangka Berpikir



²¹ Cheong Cheng and Ming Tam, "A Typology of Organizational Culture In Primary Schools." *International Journal of Educational Reform*. Vol.12, No. 1 (2003): 2-5

F. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Tesis Armenia Septiarini, Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2021 yang berjudul, “Implementasi Manajemen Pembiayaan di SMA Muhammadiyah 8 Ciputat”.²² Hasil penelitian ini antara lain: (1) Perencanaan pembiayaan di SMA Muhammadiyah 8 Ciputat terlaksana dengan baik. Hal ini diawali dengan kehadiran kepala sekolah dalam memberikan arahan sebelum pembagian tugas, menghargai pendapat bawahan (pendidik dan tenaga kependidikan), serta melibatkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). (2) Pengorganisasian pembiayaan di SMA Muhammadiyah 8 Ciputat dilaksanakan sesuai dengan hasil perencanaan yang ditetapkan seperti penyusunan detail pekerjaan, pembagian kerja, penyatuan pekerjaan dan koordinasi. Beberapa aspek tersebut telah dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk sehingga dalam pengelolaan sumber pembiayaan di sekolah dapat terealisasi sebagaimana yang direncanakan. (3) Pada aspek pelaksanaan pembiayaannya, terdapat dua faktor yang menyebabkan implementasi pembiayaan belum berjalan optimal, diantaranya: pertama, keterlambatan pencairan dana yang bersumber dari anggaran Pemerintah Daerah atau dana BOS sehingga menyebabkan tidak efektifnya pengelolaan anggaran yang tersedia. Kedua, fokus utama pengalokasian keuangan sekolah dipusatkan pada pengembangan infrastruktur sekolah seperti pembangunan gedung dan penyediaan sarana prasarana, namun hal tersebut tidak diimbangi dengan kesejahteraan pegawai. (4) pengawasan pembiayaan di SMA Muhammadiyah 8 Ciputat. Dalam implementasinya aktivitas pengawasan sudah berjalan dengan baik. Hal ini ditandai dengan adanya pengawasan pada kegiatan pembiayaan, kemudian adanya koordinasi secara intens antara pihak sekolah dan tim pengawas pemerintah daerah dalam melaporkan hasil kegiatan pembiayaan sehingga hasilnya berjalan secara efektif.

²² Armenia Septiarini, “*Implementasi Manajemen Pembiayaan di SMA Muhammadiyah 8 Ciputat*” (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021)

2. Tesis Pipin Desniati, Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam Institut PTIQ Jakarta 2019 yang berjudul, “manajemen pembiayaan pendidikan pondok Darul Muttaqien Parung Bogor²³. Hasil penelitian ini antara lain: Pertama, dari segi pelaksanaan rencana sistem pendidikan dan pengelolaan keuangan, kebijakan sistem pembiayaan pondok pesantren Darul Muttaqien adalah pimpinan pondok pesantren yang terdiri dari ketua yayasan, wakil pimpinan dan bendahara pondok. Kedua, aspek implementasi sistem pendanaan pondok pesantren Darul Muttaqien sudah berlaku sejak tahun ajaran 2018-2019. Ketiga, aspek evaluasi. Saat ini masih memiliki beberapa kendala diantaranya; 1) kurangnya sosialisasi penggunaan sistem dari manual ke online, 2) kurangnya pembinaan sumber daya manusia (SDM) yang menjalankan sistem pembiayaan, 3) kurangnya perangkat yang menunjang sistem pembiayaan.
3. Tesis Luluk Aryani Isusilaningtyas²⁴, Mahasiswa Program pascasarjana IAIN Salatiga 2015 yang berjudul, ”Strategi Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan Islam Melalui Manajemen Pembiayaan (Studi Kasus pada MI Negeri Ambarawa Kab. Semarang)”. Hasil dari penelitian diantaranya: Pertama, dalam rangka peningkatan kualitas guru akan dilaksanakan strategi pengelolaan keuangan pendidikan yaitu penekanan pada profesionalisme, disiplin dan tugas-tugas peningkatan mutu sekolah. Kedua, Untuk memajukan peserta didik, strategi pengelolaan pembiayaan pendidikan dilaksanakan melalui pembinaan di bidang seni, olahraga, agama, kepramukaan, bahasa Inggris dan kepribadian. Ketiga, di bidang sarana dan prasarana, strategi manajemen pendidikan adalah meningkatkan sumber dana, melaksanakan program peningkatan mutu untuk mendukung sarana prasarana, dan kesejahteraan guru.
4. Tesis Rifdatul Mukhlisoh, Mahasiswa Program Magister Manajemen Pendidikan Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2020, yang berjudul,

²³ Pipin Desniati, “*Manajemen pembiayaan pendidikan pondok Darul Muttaqien Parung Bogor*” (Jakarta:PTIQ, 2019)

²⁴ Luluk Aryani Isusilaningtyas, ”*Strategi Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan Islam Melalui Manajemen Pembiayaan (Studi Kasus pada MI Negeri Ambarawa Kab. Semarang)*” (Salatiga: IAIN Salatiga, 2015)

“Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dalam Peningkatan Prestasi Belajar Siswa di MAS Darul Khairat Kota Pontianak Kalimantan Barat”.²⁵ Hasil dari penelitian ini diperoleh antara lain: Pertama, adanya peningkatan prestasi siswa dalam setiap tahunnya, karena adanya dukungan dari pembiayaan pendidikan. Dengan memfasilitasi siswa yang berprestasi dengan ekstrakurikuler dan memberikan beasiswa bagi siswa yang berprestasi. Kedua, manajemen pembiayaan pendidikan memperoleh dana pembiayaan pendidikan hanya dari BOS, dari 90% dana dikelola untuk kepentingan MA dan 10% untuk mendukung berjalannya kegiatan ekstrakurikuler dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Ketiga, implikasi manajemen pembiayaan pendidikan sangat terlihat karena siswa berprestasi dalam setiap tahunnya ada peningkatan, dengan manajemen pembiayaan pendidikan yang hanya bersumber dari dana BOS dapat diharapkan siswa dapat lebih meningkatkan prestasi dengan adanya ekstrakurikuler.

5. Tesis Eny Masruroh, Mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Ponorogo 2019, yang berjudul, “Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas Guru) Studi pada Pondok Pesantren “Wali Songo” Ngabar(”²⁶. Hasil dari penelitian ini antara lain: Pertama, Perencanaan pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan kualitas guru, di lembaga tersebut meliputi penentuan rencana anggaran, menentukan sumber dana, dan penyusunan serta pengesahan rancangan anggaran pendapatan dan belanja (RAPB). Adapun program peningkatan kualitas guru yang dicoba antara lain mencermati penyeleksian penerimaan guru, melaksanakan sebagian program pengembangan guru serta tingkatan kesejahteraan guru. Kedua, Pelaksanaan pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan kualitas guru, meliputi dua aktivitas yakni penerimaan dana serta pengeluaran dana. Tipe pembukuan yang digunakan ialah buku kas umum. Ketiga, Evaluasi pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan kualitas guru ada dua wujud, yakni penilaian internal serta penilaian eksternal.

²⁵Rifdatul Mukhlisoh, “*Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dalam Peningkatan Prestasi Belajar Siswa di MAS Darul Khairat Kota Pontianak Kalimantan Barat*” (Malang: UIN Malang, 2020)

²⁶ Eny Masruroh, “*Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas Guru (Studi pada Pondok Pesantren “Wali Songo” Ngabar)*” (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019)

Penilaian internal dilakukan oleh yayasan yang meliputi penilaian bulanan serta tahunan, sebaliknya penilaian eksternal dilakukan oleh pemerintah.

G. Definisi Operasional

Untuk pemahaman dan mengetahui arah tujuan pembahasan ini, maka dibutuhkannya definisi istilah. Sehingga nantinya tidak terdapat kerancuan dalam memahami kajian yang dimaksud oleh peneliti. Adapun beberapa istilah, sebagai berikut:

1. Manajemen Pembiayaan

Manajemen keuangan atau pembiayaan merupakan suatu tindakan untuk mengatur keuangan (pembiayaan) dengan baik dan sesuai dengan tata cara yang sudah ditentukan. Manajemen keuangan merupakan proses pengaturan dan pelaksanaan biaya secara efektif dan efisien dalam usaha pembiayaan pendidikan meliputi:

- a. Proses Perencanaan anggaran (*budgeting*)
- b. Proses Penggunaan pembiayaan/penganggaran
- c. Pencatatan anggaran (*accounting*)
- d. Proses Pelaporan (*auditing*)

2. Pembiayaan Pendidikan

Pembiayaan Pendidikan merupakan keseluruhan pembiayaan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi darimana saja dana diperoleh dan untuk apa saja dana itu digunakan.

3. Madrasah

Madrasah adalah sebuah kata dalam bahasa Arab yang artinya sekolah. Asal katanya yaitu darasa (baca: darosa) yang berarti belajar. Di Indonesia, madrasah dikhususkan sebagai sekolah (umum) yang kurikulumnya terdapat pelajaran-pelajaran tentang keislaman. Madrasah juga merupakan nama lain dari sekolah, yang mempelajari tentang agama Islam. Ada beberapa kategori madrasah dalam lembaga pendidikan, seperti madrasah ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah, Mu'allimin, Mu'allimat, dan Diniyah.